

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI

### POLICY EVALUATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM

Khusnul Khothimah<sup>1</sup>, Diana Hertati<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

\*Korespondensi: Diana Hertati. Email: dianahertati.dh@gmail.com

(Diterima: 10-03-2021; Ditelaah: 02-04-2021; Disetujui: 05-05-2021)

#### ABSTRACT

Poverty has been one of social phenomena still inherent in people. The Covid-19 pandemic has impacted on the growing numbers of poor people. The government has conducted various efforts to overcome the poverty. One of efforts of the government is cash social assistance program (BST program). The purpose of this research is to evaluate the BST program policy in Tambaksari District, Surabaya City. The program evaluation uses William N. Dunn's criteria of policy evaluation. Method of this research uses descriptive qualitative method. Data of this research are collected by interview, observation, documentation and literature study. Based on the criteria of policy evaluation, results of this research indicate that the BST program: (1) is less effective because of less correct target of the program, less entire socialization of the program to people, and the absence of correction to the monitoring results of the program; (2) is efficient because of the correct time for distributing the assistance; (3) is only restrictedly useful because of insufficient assistance fund to the next time of distribution; (4) is still unequally distributed because of still being unfully-assisted poor people as a consequence of using old data; (5) is less satisfactory for poor people because the number of assistance is not in accordance with the growing prices of the needs; (6) is correctly useful at least for helping to fulfill the needs of poor people.

**Key words:** Cash Social Assitance, Policy Evaluation, Public Policy.

#### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang masih melekat pada masyarakat. Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak pada semakin banyaknya pertambahan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya menyelenggarakan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan program BST di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Evaluasi program menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Didasarkan pada kriteria evaluasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program BST: (1) kurang efektif karena kurang tepatnya sasaran program, kurang menyeluruhnya sosialisasi program ke masyarakat, dan tidak-adanya perbaikan terhadap hasil pemantauan program; (2) sudah efisien karena tepat waktu penyaluran bantuan; (3) hanya memberikan manfaat terbatas karena tidak-cukupnya dana bantuan yang diterima hingga waktu penyaluran berikutnya; (4) masih didistribusikan tidak merata karena masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya sebagai konsekuensi dari penggunaan data lama; (5) kurang memuaskan masyarakat penerima karena tidak-sebandingnya jumlah bantuan dengan naiknya harga kebutuhan; (6) tepat bermanfaat setidaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

**Kata kunci:** Bantuan Sosial Tunai, Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik.

## PENDAHULUAN

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada penanganan kemiskinan di setiap daerah diwujudkan dalam bentuk program bantuan sosial melalui Dinas Sosial.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Yasa, 2008). Namun secara umum kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi akibat rendahnya pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Garis kemiskinan merupakan indikator untuk pengelompokan penduduk menjadi miskin atau tidak. Kategori penduduk miskin memiliki rata-rata pendapat per kapita setiap bulan di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan pada September 2019 sebesar Rp 440.538 per kapita per bulan (Aris, 2020).

Selain itu, pemerintah dalam menentukan masyarakat miskin selalu berpedoman pada 14 kriteria masyarakat miskin menurut BPS (2014), yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per-orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/fasilitas bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya mengonsumsi daging/

susu/ayam dalam satu kali seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Angka kemiskinan dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin Kota Surabaya tahun 2010-2019 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010-2019

Kemiskinan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kemiskinan (%)	7,07	6,58	6,25	6	5,79	5,82	5,63	5,39	4,88	4,51
Garis Kemiskinan (Rp)	182586	310074	339208	372511	393151	418930	438283	474365	530178	567474
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	195,7	183,3	175,7	169,4	164,4	165,72	161,01	154,71	140,81	130,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (Oktober 2020)

Pada masa pandemi seperti ini pun pemerintah memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST). BST merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp 600 ribu per bulan sebanyak 3 bulan yang pembagiannya dilakukan di sejumlah kantor pos yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Utomo, 2020).

Kebijakan BST sangat riskan menciptakan karakter masyarakat yang selalu

dimanja dan menjadi bangsa “peminta-minta”. Selain itu BST tidak mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas masyarakat miskin, melainkan lebih memberikan dampak negatif pada penurunan produktivitas (Dewi, 2011). Masalah ini menurut William N. Dunn termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan pada kriteria efektivitas.

Selain itu pada implementasinya tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu diketahui adanya warga yang mengembalikan Bantuan Sosial karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan (Sulhan & Sasongko, 2017). Masalah ini menurut William N. Dunn termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan pada kriteria kecukupan dan perataan.

Dalam pembagian dana bantuan pun petugas kesulitan karena terdapat warga yang tidak mempunyai identitas diri yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan dana bantuan tersebut dan pengambilan tidak dapat diwakilkan. Masalah ini menurut William N. Dunn termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan pada kriteria efisiensi. Dan juga adanya persoalan penurunan dana subsidi, hal ini menurut William N. Dunn termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan pada kriteria responsibilitas.

Kemudian tidak terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan dana BST sehingga penerima dapat menggunakan dana dengan tidak semestinya seperti belanja baju, sepatu, dan sejenisnya. Masalah ini menurut William N. Dunn termasuk dalam kriteria evaluasi kebijakan pada kriteria efisiensi dan ketepatan. Dari persoalan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan program BST di Kota Surabaya, khususnya pada Kecamatan Tambaksari.

## MATERI DAN METODE

### Kebijakan Publik

Menurut William dikutip oleh Islamy (2017: 5), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang

aktor atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu dimana keputusan-keputusan tersebut seyogyanya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya. Sedangkan menurut Dye dikutip oleh Anggara (2014: 35), *public policy is whatever the government choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah perumusan kebijakan yang dibuat sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) untuk mencapai tujuan tertentu.

### Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi menurut Arikunto dikutip oleh Fremi (2018: 14) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Menurut Winarno (2008: 225), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Sedangkan menurut Dunn (2003: 608) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses perbandingan atau kegiatan untuk menentukan nilai berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dunn (2003: 610) menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda
Responsibilitas	Apakah kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Sumber: William N. Dunn (Nugroho, 2018: 786)

### Penetapan Sasaran Program

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Oleh karena itu, sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai (Badan Pengelolaan Keuangan, 2018: 1). Dan juga penetapan suatu sasaran program berguna untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan suatu organisasi dalam mendukung terselesenggaranya fungsi organisasi tersebut.

### Bantuan Sosial Tunai

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19, Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Bantuan ini merupakan bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan penerima BST

selain dari DTKS, juga menggunakan data keluarga penerima manfaat BST diprioritaskan berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima BST hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. BST ini diharapkan dapat meringankan beban hidup bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan karena tempat kerjanya tidak beroperasi akibat pandemi.

### Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif. Dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017: 9). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti (Susanti, 2016: 281). Jadi, jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program, maka dibutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi program mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau program dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Atau bisa dikatakan bahwa evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah

proses akhir kebijakan atau seberapa jauh kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan sesuai tujuan. Dan untuk menilai keberhasilan suatu program juga diperlukan pengembangan beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi.

Peneliti melakukan tinjauan ke lapangan tempat BST ini berlangsung di salah satu kecamatan di Surabaya yaitu Kecamatan Tambaksari. Peneliti mengambil lokasi penelitian di tempat tersebut karena Kecamatan Tambaksari merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penerima BST tertinggi di Kota Surabaya sebesar 21.028 penerima. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait BST, yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Kantor Pos Pusat Surabaya, Kecamatan Tambaksari selaku kecamatan yang memiliki jumlah penerima BST terbanyak di Surabaya, Kelurahan, RW, RT dan masyarakat penerima BST maupun yang tidak menerima BST.

Evaluasi kebijakan program BST di Kota Surabaya, khususnya pada Kecamatan Tambaksari, dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Nugroho (2018: 786) sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas program di sini sangat berkaitan erat dengan sejauhmana pelaksanaan BST telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas BST dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara konsep dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga memungkinkan tujuan dari program BST berjalan dengan baik. Adapun tujuan dari adanya BST, yaitu untuk mengurangi beban hidup masyarakat sebagai akibat dampak Covid-19.

Untuk melihat tingkat efektivitas BST di Kecamatan Tambaksari, terdapat empat hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan, yaitu:

- 1) Ketepatan Sasaran Program: Keefektifan pelaksanaan BST dapat dilihat salah satunya dari ketepatan sasaran program. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa ketepatan sasaran program terlihat masih sangat kurang. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya penerima BST yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti adanya orang mampu yang terdaftar sebagai penerima BST, orang yang sudah pindah juga masih terdaftar sebagai penerima BST, bahkan orang yang sudah meninggal juga masih terdata menerima BST. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan, yaitu masih data lama. Pada hal data bersifat dinamis yang selalu berubah-ubah mengikuti keadaan di lapangan.
- 2) Sosialisasi Program: Selain dari kepuasan, keefektifan BST dapat dilihat dari sosialisasi program. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa pada dasarnya memang informasi mengenai adanya program BST sudah beredar di media-media. Namun hal tersebut masih belum menjangkau ke seluruh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan tersebut.
- 3) Tujuan Program: Keefektifan BST juga dapat dilihat dari tujuan program. Tujuan program adalah kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa masyarakat menilai bahwa adanya program BST sangat membantu mereka dalam meringankan beban hidup. Dan adanya BST memberikan pengaruh yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, meskipun tidak memberikan dampak yang sangat besar.
- 4) Pemantauan Program: Selain itu, keefektifan BST juga dapat dilihat dari pemantauan program. Pemantauan

program adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu program, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat ditindaklanjuti. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa ada pelaksanaan pemantauan terkait program BST. Namun meskipun adanya pemantauan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai penerima yang tidak tepat sasaran, realitanya di lapangan masih saja banyak penerima yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan dari pihak RW maupun RT ada yang tidak berani karena diintimidasi oleh orang-orang tersebut dan didasarkan oleh perasaan sungkan atau tidak enak hati untuk mencabut status mereka sebagai penerima.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan dari masing-masing sub-fokus, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program pada fokus efektivitas, dapat diketahui bahwa program BST tidak efektif meskipun tujuan dari adanya program BST sangat membantu penerima dalam meringankan beban hidup. Hal ini disebabkan ketepatan sasaran program terlihat masih sangat kurang, yakni masih banyaknya penerima BST yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Perihal sosialisasi program pun masih belum menjangkau ke seluruh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program BST. Selain itu, pemantauan program BST memang masih berjalan, namun tidak dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan karena kurangnya ketegasan pemerintah terkait yang menangani hal tersebut.

## 2. Efisiensi

Fokus dari kriteria ini adalah banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program BST meliputi sumber

daya yang digunakan baik alokasi tenaga (SDM) dan estimasi waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Untuk melihat tingkat keefisienan dari BST di Kecamatan Tambaksari, ada dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Sumber Daya Manusia: Keefisienan pelaksanaan BST dapat dilihat dari banyaknya usaha yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BST. Apabila sedikit usaha yang dikeluarkan, maka dapat dikatakan efisien, namun jika sebaliknya maka dikatakan tidak efisien. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa banyak usaha atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program BST ini, yakni mulai dari pihak Dinas Sosial sampai RT RW, mulai dari survei hingga penyaluran bantuan.
- 2) Efisiensi Waktu: Keefisienan pelaksanaan BST juga dapat dilihat dari banyaknya waktu yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program BST. Apabila sedikit waktu yang dikeluarkan, maka dapat dikatakan efisien, namun jika sebaliknya maka dikatakan tidak efisien. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa proses penyaluran BST sudah tepat waktu, yaitu awal bulan sampai pertengahan bulan. Dan juga proses pengambilan BST tidak memerlukan waktu yang banyak, disebabkan tiap tempat pembagian sudah memiliki petugas loket atau juru bayar dan juga ada banyak tenaga pendamping. Jadi bagi mereka yang mengambil BST sudah tidak perlu antri panjang dan tidak membuang banyak waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan dari masing-masing sub

fokus, yaitu efisiensi sumber daya manusia dan efisiensi waktu pada fokus efisiensi dapat diketahui bahwa program BST sudah efisien. Hal ini disebabkan penyaluran subsidi sudah tepat waktu, yaitu awal bulan hingga pertengahan bulan, pengambilannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga dengan sumber daya manusianya, banyak usaha atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program BST ini, yakni mulai dari pihak Dinas Sosial, Kantor Pos, Kelurahan sampai RT RW yang memiliki tugas masing-masing mulai dari survei hingga penyaluran bantuan.

### 3. Kecukupan

Kecukupan Program BST berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah kemiskinan akibat dampak Covid-19. Untuk melihat tingkat kecukupan dari BST di Kecamatan Tambaksari, ada dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan yakni sebagai berikut:

1) Program BST memecahkan permasalahan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19: Salah satu pengukuran kecukupan dapat dilihat dari terpecahkannya permasalahan masyarakat dari adanya suatu program BST. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa BST masih belum bisa memecahkan permasalahan masyarakat akibat pandemi. Mereka merasa tidak cukup dengan jumlah bantuan yang diterima. Hal ini disebabkan oleh tingginya perekonomian saat ini, sehingga masyarakat membutuhkan dana yang lebih daripada yang diterima. Meskipun BST dapat meringankan beban hidup mereka, namun jumlah subsidi BST hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 1-2 minggu saja. Jadi Program BST ini hanya memberikan manfaat terbatas karena dana yang diterima tidak cukup sampai waktu penyaluran bulan berikutnya.

2) Dilihat dari segi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat setelah adanya program BST: Pengukuran kecukupan juga dapat dilihat dari perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat setelah adanya program BST. Dari hasil wawancara di atas dapat dimaknai bahwa dengan adanya program BST tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, namun juga dapat mengubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat tersebut. Hal ini terjadi karena mereka dapat lebih bersyukur dan bersikap terbuka atas bantuan yang telah ada meskipun dengan nominal yang seadanya, karena dapat membantu mereka dimasa pandemi saat ini. Dan mereka juga menyadari bahwa dengan adanya pengurangan nominal dari 600 ribu menjadi 300 ribu dikarenakan masih banyak warga yang membutuhkan, jadi harus dibagi sama rata agar semua warga bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan dari masing-masing subfokus, yaitu program BST memecahkan permasalahan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat setelah adanya program BST pada fokus kecukupan dapat diketahui bahwa program BST hanya dapat memberikan manfaat terbatas karena dana yang diterima tidak cukup sampai waktu penyaluran bulan berikutnya. Namun adanya BST dapat mengubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat lebih baik lagi terhadap suatu hal terutama bantuan sosial.

### 4. Perataan

Perataan dalam program BST merupakan manfaat yang diterima oleh penerima BST disalurkan secara merata kepada yang seharusnya menerima subsidi. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat.

Untuk melihat tingkat pemerataan BST di Kecamatan Tambaksari, ada dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan pendistribusian program BST: Pemerataan dalam pelaksanaan BST dapat dilihat dari pemerataan pendistribusian dana subsidi BST kepada kelompok masyarakat rentan dan terdampak Covid-19. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa pendistribusian BST belum merata ke masyarakat miskin, bahkan ada masyarakat yang tidak semestinya mendapat BST justru mendapat bantuan. Adanya ketidakmerataan dalam pembagian BST tidak terlepas dari masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya menjadi penerima BST. Hal tersebut disebabkan akibat masih digunakannya data lama yang seharusnya tidak dipakai untuk acuan. Padahal kondisi masyarakat juga berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Ada yang sudah menjadi mampu atau kaya, bahkan ada yang menjadi lebih miskin.
- 2) Berkurangnya jumlah masyarakat miskin: Selain itu, pemerataan dalam pelaksanaan BST juga dapat dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin dapat menunjukkan adanya perbaikan pada sektor pemerataan, semakin sedikit orang miskin berarti dapat diartikan bahwa pendapatan masyarakat meningkat atau bisa dikatakan pengeluaran masyarakat berkurang. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa dengan adanya program BST tidak bisa mengetahui apakah program ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin atau tidak. Hal ini disebabkan dari pihak BPS belum ada data terkait persentase penduduk miskin di tiap kota maupun kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan dari masing-masing sub

fokus yaitu pemerataan pendistribusian program BST dan berkurangnya jumlah masyarakat miskin pada fokus pemerataan dapat diketahui bahwa tidak merata dikarenakan masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya menjadi penerima BST. Hal ini disebabkan masih digunakannya data lama yang seharusnya tidak dipakai karena kondisi masyarakat juga berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, pemerataan dapat dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin. Namun sampai saat ini belum ada data dari BPS mengenai jumlah masyarakat miskin tiap kota maupun kabupaten.

## 5. Responsibilitas

Responsibilitas Program BST merupakan bentuk respon penerima subsidi yang timbul akibat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan BST. Untuk melihat tingkat responsibilitas BST, ada dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan yakni sebagai berikut:

- 1) Tanggapan berupa kepuasan masyarakat terhadap program BST: Responsibilitas dalam pelaksanaan BST salah satunya dapat dilihat dari tanggapan masyarakat mengenai adanya program BST. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa masyarakat kurang puas dengan Program BST. Pada dasarnya program BST memang dapat membantu mereka dalam mengurangi beban pengeluaran mereka, namun yang sangat disayangkan oleh masyarakat adalah jumlah subsidi BST tersebut tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan saat ini yang semakin naik.
- 2) Kelompok rentan dan terdampak mendapatkan preferensi (prioritas): Responsibilitas dalam pelaksanaan BST dapat dilihat juga dari kelompok sasaran yang mendapatkan prioritas seperti masyarakat yang rentan dan terdampak Covid-19. Kesimpulan dari



hasil wawancara, yaitu program BST memang ditujukan untuk warga yang tidak mampu dan terdampak Covid-19. Namun, semua mendapat perlakuan yang sama atau tidak ada yang diprioritaskan, disebabkan semua orang baik miskin maupun kaya juga dikatakan terdampak Covid-19 salah satunya dari segi perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan dari masing-masing subfokus yaitu kepuasan masyarakat terhadap program BST dan kelompok rentan dan terdampak mendapatkan prioritas pada fokus responsibilitas dapat diketahui bahwa masih belum memenuhi. Hal tersebut disebabkan masyarakat penerima BST kurang puas dengan program BST karena jumlah subsidi BST tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan saat ini yang semakin naik. Selain itu, juga tidak ada prioritas terhadap sasaran penerima.

## 6. Ketepatan

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yaitu apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran. Untuk melihat tingkat ketepatan BST, ada dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan sebagai berikut:

1) Hasil yang dicapai bermanfaat atau bernilai: Ketepatan dalam pelaksanaan BST salah satunya dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dari program BST bermanfaat atau bernilai bagi masyarakat penerima BST. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai bahwa Program BST bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan tingginya perekonomian saat ini. Hal ini disebabkan karena BST sedikit banyak cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan juga cukup memberikan keringanan kepada

mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

2) Membandingkan antara peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan: Ketepatan juga dapat dilihat dari membandingkan antara peraturan yang mengatur BST yakni Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19 dengan apa yang ada di lapangan. Dari hasil wawancara diatas dapat dimaknai bahwa teknis penyaluran BST sudah sesuai dengan yang ada di peraturan yaitu berkoordinasi atau bekerjasama dengan lembaga terkait yakni dari pendataan oleh RT RW, kemudian ke kelurahan yang nantinya akan di input oleh kelurahan, kemudian data masuk ke dinas sosial, lalu data dikirim ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, setelah itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia data tersebut dibagikan kepada pos penyalur, dan pos penyalur menyalurkan dana ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijabarkan dari masing-masing sub fokus yaitu hasil yang dicapai bermanfaat atau bernilai dan membandingkan antara peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan pada fokus ketepatan dapat diketahui bahwa sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan program BST bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi penerima meskipun subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan tingginya perekonomian saat ini dan juga untuk teknis penyaluran BST sudah sesuai dengan yang ada di peraturan yaitu berkoordinasi atau bekerjasama dengan lembaga terkait.

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan program BST di Kota Surabaya, khususnya pada Kecamatan Tambaksari, diukur berdasarkan kriteria evaluasi, didapatkan hasil yang kurang memuaskan. Hal utama dalam melaksana-

kan evaluasi harus berdasarkan pada indikator hasil dan dampak yang diberikan oleh program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, program ini dikatakan belum bisa memecahkan permasalahan masyarakat akibat Covid-19, namun cukup mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok dan dapat meringankan beban hidup penerima rumah tangga sasaran meskipun dengan nominal yang masih dirasa jauh dari kata cukup.

Selain itu, program BST sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19, hanya saja di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik kriteria masyarakat “terdampak” yang seperti apa yang berhak menerima bantuan. Karena saat pandemi ini semua orang “terdampak”, baik kaya maupun miskin. Ada pula yang masih disayangkan adalah bantuan ini belum merata ke masyarakat yang membutuhkan dan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran disebabkan data yang digunakan masih menggunakan data lama dan lamban dalam pembaharuan data, selain itu juga kurangnya sosialisasi terkait BST kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan telah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat pencapaian program dan permasalahan program BST sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program di masa mendatang.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari kriteria efektivitas, program BST kurang efektif meskipun tujuan program BST sudah tercapai, yaitu dapat membantu meringankan beban hidup. Kurang efektif karena sasaran program BST kurang tepat, sosialisasi program juga sudah dilakukan namun kurang menyeluruh ke masyarakat, dan meskipun adanya pemantauan program BST tetap masih tidak ada perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Dilihat dari kriteria efisiensi, program BST sudah efisien. Dikatakan efisien karena penyaluran subsidi sudah tepat waktu, yaitu awal bulan sampai pertengahan bulan, pengambilan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga dengan sumber daya manusianya, banyak usaha atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program BST ini, yakni mulai dari pihak Dinas Sosial, Kantor Pos, Kelurahan sampai RT/RW yang memiliki tugas masing-masing, yaitu mulai dari survei hingga penyaluran bantuan.
3. Dilihat dari kriteria kecukupan, program BST hanya memberikan manfaat terbatas karena dana yang diterima tidak cukup sampai waktu penyaluran bulan berikutnya. Namun adanya BST dapat mengubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat lebih baik lagi terhadap suatu hal terutama bantuan sosial.
4. Dilihat dari kriteria pemerataan, pendistribusian BST masih tidak merata karena masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya menjadi penerima BST. Hal ini disebabkan masih digunakannya data lama yang seharusnya tidak dipakai karena kondisi masyarakat juga berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, pemerataan dapat dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin. Namun sampai saat ini belum ada data dari BPS mengenai jumlah masyarakat miskin tersebut.
5. Dilihat dari kriteria responsibilitas, masyarakat penerima BST kurang puas dengan program BST karena jumlah

subsidi BST tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan saat ini yang semakin naik. Selain itu, tidak terdapat prioritas terhadap sasaran penerima.

6. Dilihat dari kriteria ketepatan, program BST bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin meskipun subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan tingginya perekonomian saat ini. Di samping itu, teknis penyaluran BST sudah sesuai dengan peraturan, yaitu saling berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga terkait.

### Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada pengurangan nominal lagi terhadap subsidi BST, karena memang tidak sesuai antara dana yang diberikan dengan naiknya kebutuhan perekonomian saat ini.
2. Informasi mengenai program BST disosialisasikan terlebih dahulu secara meluas dan serempak di seluruh kota maupun daerah, agar masyarakat tahu adanya program baru sehingga dapat berkontribusi.
3. Penetapan sasaran penerima BST menggunakan data baru yang harus dilakukan pembaharuan data secara berkala, karena memang kondisi di lapangan cepat sekali berubah-ubah.
4. Perlu dilakukan perbaikan tentang apa saja yang dirasa kurang setelah pelaksanaan pemantauan. Apabila tidak segera diperbaiki maka kekurangan tersebut akan berdampak pada yang lainnya.
5. Pemerintah terkait lebih tegas menindak terhadap pelaku penerima BST yang tidak tepat sasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. T. R. P. Setia (ed.), 1st ed. Pustaka Setia.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (26th ed.). Bandung: Alfabeta.

#### Jurnal

Sulhan, Muhammad & Sasongko, Totok. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang). *JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1): 15-18. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.365>

Susanti, S. (2016). Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *e-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2): 2795-2808. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/Jurnal \(05-17-16-04-40-45\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/Jurnal%20(05-17-16-04-40-45).pdf).

Yasa, I. G. W. Murjana. (2008). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Bali. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2): 86-91. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3187>.

#### Laman

Aris, A. (2020). *Garis Kemiskinan pada September 2019 Capai Rp440.538/Kapita/Bulan*. 15 Januari. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/1190395/garis-kemiskinan-pada-september-2019-capai-rp440.538-kapitabulan#:~:text=Bisnis.com%2C JAKARTA - Badan,538 per kapita per bulan.&text=anggota rumah tangga.-,Dengan demikian%2C besarnya Garis Kemiskinan per.>

BPKAD PROVSU. (2018). *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan*. 31 Desember. <http://bpkad.sumutprov.>

go.id/news-VISI,-MISI,-TUJUAN-DAN-SASARAN,-STRATEGI-DAN-KEBIJAKAN.html.

BPS. (2014). *14 Kriteria Miskin Menurut Standard BPS*. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>.

Dewi, M. S. (2011). *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Fremi, H. A. (2018). *Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu Dalam Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purwo-rejo Tahun 2018*. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Islamy, Muh. Irfan. (2017). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. <http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf>.

Utomo, D. P. (2020). *Total 65.908 Warga Surabaya Terima BLT Dampak Corona*. 11 Mei. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5010347/total-65908-warga-surabaya-terima-blt-dampak-corona>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020. <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15951550598920.pdf>.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://ngada.org/uu13-2011.htm>.